

Triwulan II 2019, KKP Catat PDB Perikanan Naik Jadi Rp 62,24 Triliun



Menteri Susi Pudjiastuti saat pawai bebas plastik di Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan kenaikan pada nilai PDB Perikanan di triwulan II 2019. Kenaikan itu mencapai Rp 62,24 triliun dibanding triwulan II 2018 sebesar Rp 58,58 triliun. "Saya ingin update kinerja KKP. PDB kita ini di triwulan II 2019 naiknya sebesar 6,25 persen atau 29,39 persen lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDB triwulan II 2018 yang besarnya 4,83 persen," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta. Susi menjelaskan, pencapaian tersebut memberikan kontribusi PDB perikanan Triwulan atas dasar harga berlaku tahun 2014-2018 terhadap PDB nasional dengan rata-rata sebesar 2,60 persen. Persentase ini meningkat dari rata-rata tahun 2014 sebesar 2,32 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan income para pelaku sektor perikanan secara rata-rata. "Kawan-kawan harus ingat, PDB seperti ini dibangun atas data. Banyak juga yang sampai sekarang kepatuhan pengusaha untuk melaporkannya masih kurang. Dapatnya 2.000 ton bilangannya 500 ton. Jadi kalau mereka melaporkan yang sebenarnya mungkin angka yang dilaporkan lebih dari itu," ujar Menteri Susi. Sementara itu berkat kebijakannya, produksi ikan tuna, tongkol, dan cakalang juga mengalami peningkatan. Menurut data Fishstat 2019, Indonesia masuk menjadi produsen nomor 1 tuna dunia, dari 1.178.173 ton tahun 2012 menjadi 1.342.601 ton tahun 2017. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan total 485.875 ton tahun 2017. "Indonesia ini produksinya jutaan, negara yang lain hanya ratusan ribu saja," ucapnya. Susi menjelaskan, pertumbuhan produksi ikan nasional yang meningkat didorong oleh produksi ikan di beberapa wilayah mengalami peningkatan, termasuk wilayah Sulawesi Utara. Dari data yang dikemukakan KKP, rerata pertumbuhan produksi 2014-2017 di Minahasa Tenggara adalah yang tertinggi, yakni sebesar 82,91 persen. "Tuh lihat angkanya, kata Gubernurnya tidak ada ikan di situ, justru ada peningkatan produksi," terang Susi. Setali tiga uang, ekspor juga mengalami peningkatan yang signifikan. Volume ekspor hasil perikanan tahun 2017-2018 naik 4,45 persen dan nilai ekspor naik 7,44 persen. Ekspor di Provinsi Sulawesi Utara pasca moratorium kapal eks asing juga terus bangkit. Hal ini menunjukkan kinerja industri perikanan lokal di Provinsi Sulawesi Utara bisa bangkit tanpa kekuatan kapal eks-asing.